



Galian C Jadi Rebutan

BISNIS galian C sangat menggiurkan. Buktinya, galian C menjadi rebutan selain pengusaha juga bagi sopir truk. Dalam sepekan ini, dua kelompok sopir melakukan demo. Pertama, sopir asal Buleleng yang mengadu ke DPRD Buleleng atas perlakuan tidak adil sopir asal Karangasem yang menjual bahan material jauh dari harga yang dia tawarkan.

Kemudian kelompok yang mera-

sa disudutkan mengadu ke DPRD Bali menegaskan bahwa depo dan pengadaan galian C sudah merata dan berkeadilan. Sekaligus membantah adanya mafia galian C. Yang menjadi inti masalah adalah adanya depo galian C. Para sopir Buleleng mengaku wajib masuk depo untuk membeli pasir batu dijual ke konsumen.

**Hal. 19
Lebih Murah**



Lebih Murah

Dari Hal. 1

Sedangkan sopir asal Karangasem menurut kelompok ini bisa langsung ke pusat galian sehingga mendapatkan nilai beli yang jauh lebih murah.

Wartawan *Bali Post* melaporkan, depo pasir seluas dua hektar di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, semakin mengundang polemik. Sumber polemik, bukan pada keberadaan deponya, tapi, dugaan adanya perilaku premanisme, monopoli, persaingan harga, hingga menimbulkan reaksi keras kalangan sopir di luar Karangasem. Situasi demikian membuat beberapa pihak mulai mempersoalkan keberadaan depo ini, dalam menyelesaikan masalah pengelolaan pasir di tengah dampak bencana erupsi Gunung Agung.

Sangat dibentuk depo, awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Bali. Sebab, saat Gunung Agung pertama kali berstatus Awas, radius berbahaya sejauh 12 km dari puncak Gunung Agung harus steril. Artinya, seluruh aktivitas galian pun harus berhenti. Sehingga, muncullah ide untuk mendirikan depo, semacam lokasi tempat timbunan pasir di luar daerah radius berbahaya.

Depo pasir berdiri bersejang tiga minggu setelah terbitnya status Awas pertama 22 September 2017. Mulanya depo yang digawangi separuh pengusaha galian C di bawah komunikasi Paguyuban Pertiwi Agung di Kubu itu, dibangun di Sambirenteng, Buleleng. Sejak awal beroperasi, kehadiran depo pasir memang menjadi polemik. Adanya dugaan pelanggaran truk luar Karangasem masuk langsung ke galian, bahkan sempat mendapat penyikapan dari Bupati Buleleng. Melalui surat resmi, Pemkab Buleleng minta pelanggaran itu dihentikan. Lantaran surat Pemkab Buleleng tak disikapi serius Pemkab Karangasem, kini Pemkab Buleleng bersurat kepada Gubernur Bali, untuk menengahi persoalan ini.

Ketika radius Awas Gunung Agung 10-12 km, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri bahkan mengatakan depo idealnya dibangun di tujuh titik masing-masing untuk jalur pendistribusian Bangli, Klungkung, Yeh Malet, Kubu dan dua depo untuk pengiriman lewat laut. Rapat Forkompinda Karangasem kemudian merekomendasikan pembangunan depo harus mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Hal itu pula yang ditegaskan Ketua DPRD I Nengah Sumardi.

Sumardi mengatakan, pihaknya sejak awal sudah mengingatkan agar pembentukan depo pasir menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketika sekarang terjadi permasalahan, pihaknya mendesak eksekutif segera mengambil langkah-langkah. Selain untuk mencegah terjadinya konflik horizontal juga untuk mengamankan pendapatan dari sektor galian C.

Pendirian depo memang tak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana penjela-

Edisi : Minggu, 4 Maret 2018

Hal : 1 dari 19



Sambungan ...

san eksekutif, bahwa pendirian depo itu dulu sebatas imbauan. Staf Ahli Pemkab Karangasem Wayan Sutapa juga menegaskan, pendirian depo dulu tujuannya agar pembangunan Bali tetap bisa berjalan, saat dulu status Awasi Gunung Agung dengan radius berbahaya 12 km. Sebab, dulu dengan radius berbahaya 12 km, seluruh lokasi galian menjadi KRB (Kawasan Rawan Bencana). Sementara, sekarang dengan penurunan radius berbahaya jadi 4 km, maka sepanjang lokasi galian C di luar radius berbahaya, seharusnya tak akan jadi masalah. "Depo itu dalam pengertian kami, sama seperti yang ada di *bypass* Prof. I.B. Mantra. Hanya tempat penampungan. Ambil di sana boleh, tidak juga tak jadi masalah," tegas Sutapa.

Dengan adanya penurunan status Gunung Agung, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, belum lama ini mengaku tak sependapat kalau depo itu kemudian dibubarkan. Menurutnya, keberadaan depo ini justru harus diperkuat, karena selama ini sudah berjalan sangat baik. Bupati ingin pengelola depo dapat berkomunikasi dengan baik antarpengusaha di Kubu. Sebab, keberadaan depo masih sangat diperlukan karena Gunung Agung belum normal sepenuhnya. Gunung Agung meski sudah turun status, tetapi masih berstatus Siaga dengan radius berbahaya 4 km. "Data jumlah truk yang masuk ke sana, dari data pengelola depo dan pemerintah berbeda. Itu yang seharusnya jadi fokus pembahasan. Kok bisa beda, kenapa?" kata Bupati Mas Sumatri, seraya mengatakan itu tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan yang masuk kepada pemerintah daerah.

Bupati kembali menggarisbawahi, bahwa keberadaan depo ini, adalah solusi melihat situasi sekarang. Jadi, dia tak ingin depo ini justru memancing persoalan lain. "Sekarang, Gunung Agung sudah relatif tenang. Ada potensi galian, kelolalah itu sama-sama. Jangan ribut," tegasnya.

Bupati juga tak mempersoalkan kalau ada pengusaha lain yang juga ingin membuat depo lain. Menurutnya itu tak jadi

masalah karena membuat depo ini, sama saja dengan membuat timbunan biasa, layaknya yang ada di sepanjang Jalan *By-pass* Prof. I.B. Mantra. Pada prinsipnya, depo itu dibuat untuk menjauhkan risiko bahaya di kaki Gunung Agung atau lokasi galian, bila tiba-tiba terjadi peristiwa yang membahayakan. Dia meminta jangan dibumbui seolah-olah ada monopoli, arogansi dan lainnya.

Tetap Pertahankan Depo

Pihak pengusaha galian C Kubu yang telah bersepakat mendirikan depo pasir tetap mempertahankan deponya. Walaupun nanti Pemkab Karangasem ingin melakukan evaluasi terhadap sistem tata niaga pasir di Kubu. Alasannya, depo masih dibutuhkan untuk menciptakan kelancaran lalu lintas di jalur evakuasi sebagai antisipasi potensi erupsi Gunung Agung.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Paguyuban Per-

tiwi Agung yang mengelola depo, I Nengah Subrata, belum lama ini. "Tuduhan soal adanya pemaksaan membeli pasir ke depo, upaya monopoli, apalagi premanisme dan lain-lainnya sama sekali tidak benar. Itu tidak ada," kata Subrata belum lama ini.

Ketua paguyuban pengusaha galian Pertiwi Agung, Kubu ini mengatakan depo pasir yang sekarang berada di wilayah Desa Tianyar Barat, didirikan untuk membantu pemerintah memastikan ketersediaan material galian di tengah ancaman erupsi. Depo tetap akan beroperasi terlebih saat ini pemerintah belum menerbitkan surat resmi yang menyatakan kondisi sudah aman. Pihaknya bahkan menyebut depo mengakomodir semua kepentingan, truk lokal tetap bisa beraktivitas dan truk luar daerah tetap punya akses untuk mendapatkan material. "Truk lokal mengantarkan dari galian ke depo sedangkan truk luar mengambil di depo. Untuk kepentingan jalur evakuasi, aktivitas truk lokal juga kita batasi," katanya.

Soal harga jual material di depo, menurut dia, sejatinya bukan mahal. Depo tetap berpatokan pada harga dasar yang ditetapkan pemerintah yakni Rp

70 ribu per meter kubik. Adanya perbedaan harga depo dengan harga lokasi galian karena pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengiriman ke depo. "Tetap Rp 70 ribu per kubik, kemudian ditambah ongkos naik Rp 200 ribu dan ongkos angkut ke depo Rp 250 ribu," jelasnya.

Menyangkut aksi pencegahan dan pungutan terhadap truk yang tak mengambil pasir di depo, Subrata juga membantah. Pihaknya hanya mengatakan bahwa pengusaha yang tergabung dalam depo hanya akan menjual pasir kepada truk yang mau masuk depo. Soal protes pihak yang kontra, dia menuding itu karena mereka merasa tidak bebas. Mereka yang tidak gabung depo tidak kita ganggu. Saya justru minta pemerintah menelusuri, siapa sebenarnya yang bikin ribut," tegasnya.

Gerah dengan tuduhan seperti ini, paguyuban ini sempat membawa massa 900 orang ke DPRD Karangasem. Massa dipimpin langsung Ketua Paguyuban Pertiwi Agung Kubu, Nengah Subrata, bersama Wakil Ketua Gede Ariana dan Sekretaris Nyoman Arya. "Cuma ini cara yang tepat sebagai jalan tengah. Adanya depo, truk dari luar tinggal mengambil pasir di depo saja," kata Nyoman Arya.

Gede Ariana menilai, apa yang dilakukan kelompok kontra depo dengan meributkan depo ini, justru membuka kedok sendiri. Menurutnya, truk-truk galian yang keluar dari Kubu di luar depo, justru tidak bayar faktur atau pajak. Tiap harinya ada 70 truk. Bahkan, kelompok kontra-depo dinilai menuduh tanpa bukti, karena faktanya di lapangan tak demikian. "Saya akan bawa persoalan ini (truk tak bayar pajak) ke proses hukum. Bahkan, kalau kami tidak dibantu menuntaskan persoalan ini oleh pemerintah, mungkin saja kami akan boikot pajak ke pemerintah," tegasnya. (gik)

Edisi : Minggu, 4 Maret 2018

Hal : 19